

BAB IV
KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP ISU KONFLIK
BLOK-NATUNA DI LAUT
CHINA SELATAN

Pada bab ini penulis menjelaskan terkait kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia mengenai dengan isu konflik Blok-Natuna di Laut China Selatan yang diambil pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan tersebut meliputi 4 kebijakan, yaitu kebijakan geopolitik Indonesia, kebijakan pertahanan dan keamanan, kebijakan hukum dan diplomasi, serta kebijakan diplomasi ekonomi. Kebijakan tersebut diupayakan untuk menghadapi dan mengantisipasi konflik di Laut China Selatan, terutama terkait dengan Blok-Natuna.

Persoalan Blok-Natuna terbuka kembali ketika pada tahun 2009 pada saat China mengeluarkan pernyataan tentang sebagian wilayah perairan Natuna menjadi wilayah China. Kemudian pada tahun 2016 juga terjadi klaim kembali atas wilayah laut Natuna akibat adanya nelayan China yang ditangkap oleh Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menganut dan menghormati UNCLOS 1982 menyangkal klaim tersebut dengan dasar hukum internasional yang jelas, serta dasar historisnya. Indonesia bukan bagian dari *claimant state* yang berusaha mengklaim wilayah Laut China Selatan, tetapi hanya mempertahankan wilayahnya atau kedaulatannya. Indonesia juga terpanggil untuk ikut menjaga kemandirian regional, hal ini karena Indonesia merupakan salah satu pendiri dari ASEAN. Indonesia

menjadi pelopor dari kerja sama regional ASEAN dengan negara-negara besar lainnya, termasuk dengan China.¹

Respons Indonesia terhadap masalah Blok-Natuna yang diklaim oleh China secara umum tidak berlebihan, namun menunjukkan langkah-langkah diplomatis di segala bidang. Langkah-langkah tersebut ditunjukkan dengan apa yang telah dikonsepsikan oleh kebijakan geopolitik Indonesia dan apa yang menjadi dasar dari kebijakan luar negeri Indonesia. Kebijakan-kebijakan terkait dengan konflik dengan Laut China Selatan bagi Indonesia dilakukan melalui 4 pendekatan kebijakan yang dirasa mampu mempertahankan kedaulatan bangsa dan sekaligus mampu untuk membawa keamanan regional di kawasan ASEAN dan ASIA Pasifik.

4.1. Kebijakan Geopolitik Indonesia

Pendekatan Geopolitik yang dilakukan pemerintah Jokowi menggunakan konsep dasar hubungan politik luar negeri dengan letak geografis Indonesia. Konsep dasar sebuah politik luar negeri adalah konsep kepentingan nasional yang paling umum dan paling mendasar digunakan dalam pembahasan politik luar negeri suatu negara. Konsep ini sering digunakan juga untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam politik internasional. Kepentingan nasional adalah sebagai dasar dalam menjelaskan bagaimana karakteristik negara tersebut dalam menjalin hubungan internasional. Kepentingan nasional merupakan tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam

¹ Wawancara dengan Bapak Hudiansyah, Kasi Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional, Bakamla RI. Tanggal 6 Juli 2018.

merumuskan kebijakan luar negerinya.² Konsep dasar hubungan internasional Indonesia dan politik luar negeri Indonesia adalah untuk kepentingan nasional yaitu memajukan negara, menjaga perdamaian umum dan mensejahterakan rakyat sebagai mana termaktub dalam UUD 1945.

Berdasarkan wilayah maritim yang sangat luas, bentuk negara kepulauan dan segala potensi sumberdaya yang tersedia, maka lahirlah doktrin poros maritim dunia sebagai kebijakan geopolitik Presiden Joko Widodo. Indonesia mulai menyadari bahwa saat ini sebuah transformasi besar sedang terjadi, yaitu pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur. Negara-negara Asia sedang bangkit perekonomiannya dan perkembangan teknologinya. Jalur laut Asia merupakan jalur strategis yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, yang merupakan jalur penting bagi lalu lintas perdagangan dunia. Indonesia tepat berada di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik secara geografis, geopolitik, maupun geo-ekonomi. Indonesia sebagai negara maritim telah menegaskan sebagai Poros Maritim Dunia, sebagai kekuatan yang berada di antara dua samudera: Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Gagasan Poros Maritim Dunia dalam Renstra Kementerian Luar Negeri terdiri dari lima elemen. Elemen pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, hal ini telah dimulai dengan paradigma pembangunan maritim ditingkatkan, bukan hanya paradigma pembangunan darat. Dalam bergagai bidang paradigma pembangunan laut telah dilakukan dan dimulai dari struktur

² Anak Agung Banyu Perwita. dan Yanyan M.Yani. (2015). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosdakarya. Hal.35

pemerintah serta kesiapan SDM nya. Pelaut Indonesia (SDM) menjadi bagian terpenting karena sebagai subyek yang mampu menggerakkan apa saja dan merupakan potensial yang wajib dilibatkan sejak awal hingga perencanaan. Indonesia perlu menyiapkan keahlian di berbagai bidang kelautan, mulai dari yang bersifat teknis, teknologi, sampai ahli-ahli strategi dan hukum laut internasional. Pada level yang lebih strategis, bangsa Indonesia juga perlu memperkuat kesadaran lingkungan maritim (*Maritime Domain Awareness/MDA*).

Elemen kedua, yaitu menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan laut melalui pengembangan industri perikanan. Hal ini diwujudkan dengan pemberantasan *illegal fishing* oleh kementerian kelautan dan perikanan (KKP), pemberdayaan nelayan, konservasi kawasan laut serta program-program lain yang berada di kementerian yang lain.

Elemen ketiga, mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Pembangunan tol laut sudah mulai diwujudkan. Tol Laut merupakan sistem pengiriman atau distribusi barang menggunakan kapal-kapal kargo besar yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Pengadaan kapal-kapal dan pelabuhan-pelabuhan sudah mulai diwujudkan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung konektivitas orang dan barang ke seluruh Indonesia, sehingga kemajuan dapat merata.

Elemen keempat, melakukan diplomasi maritim yang bertujuan menghilangkan berbagai sumber konflik di laut. Hal ini telah dilakukan terkait dengan penyelesaian konflik Laut China

Selatan Blok-Natuna. Selain itu Indonesia juga memprakarsai berbagai pertemuan untuk menciptakan kawasan ASEAN yang damai, aman, stabil, dan nyaman.

Elemen kelima, membangun kekuatan dan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta menjaga keselamatan, pelayaran, dan keamanan maritim. Hal ini dilakukan dengan memperkuat aparat keamanan dan pertahanan laut, baik melalui jalur militer atau polisi laut atau pengamanan sipil melalui kementerian kelautan dan perikanan yang mengawasi keamanan wilayah dari pencurian ikan. Kekuatan militer digunakan untuk menjaga kedaulatan negara dan sebagai antisipasi hal-hal yang tidak dapat ditolelir.

Kelima elemen tersebut menjadi bagian dari Visi dan Misi Presiden Joko Widodo sebagai kebijakan kelautan Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam bentuk infografis dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1. Indonesia Poros Maritim Dunia



Sumber: <https://kemenkopmk.go.id/>

Kebijakan luar negeri Jokowi menekankan pada pendekatan geopolitik maritim. Hal ini disadari keinginan Jokowi membentuk ciri khas tersendiri dalam model kebijakan luar negerinya. Dengan demikian variabel holistik tidak bisa dipisahkan dalam proses ini. Dalam istilah *Alex mint* bahwa kebijakan ini cenderung berangkat dari pengalaman pribadi tapi bukan *decicion maker* atau istilahnya *Holistic search involves a thorough examination of all the alternatives, dimensions, and implications of the decision.*³ Holistik di asumsikan sebuah pendekatan yang lebih pada pendekatan menyeluruh seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya secara ontologi dan epistemologi. Pendekatan ini sangat berpengaruh pada pengambil kebijakan dari masukan-masukan orang diluar sistem. Pengaruh pengalaman, informasi, psikologis, situasi, kegagalan-kegagalan masalalu serta tujuan dan impian menjadi tumpuan yang diinformasikan kepada aktor yang akan nantinya mengambil kebijakan tetapi bukan dari pengalaman *decision maker* itu. Sedangkan standar prosedural institutif tidak terlalu dominan. Karakternya adalah *open image*.

Gagasan besar tentang konsep kebijakan poros maritim memang sangat holistik, artinya dengan terbentuknya model kebijakan tersebut bukan murni pemikiran Jokowi. Hal ini disebabkan oleh Jokowi membuka diri untuk diberi sejumlah informasi terutama dari tim suksesnya. Menurut penulis mengapa hal ini dilakukan , sepertinya ada kolaborasi antara Jokowi yang diawal pencalonannya di anggap sebagai “petugas partai” untuk membuat kecirikhasan terhadap model kebijakan luar negerinya. Walaupun hal

³ Alex Mintz DeRouen., 2010, *Understanding Foreign Policy Decision Making*: Cambridge University Press.,h.17.

tersebut hanyalah titipan ideologis baik dari kilas balik sejarah maupun ideologi partai. Dengan demikian Jokowi dengan minimnya pengalaman harus *open image* atau keterbukaan terhadap semua pihak terkait masalah internal atau struktural dan masalah eksternal terkait hubungan internasional.

Jokowi sebagai presiden harus bisa menginterpretasi kebutuhan domestik yang sejalan dengan kebutuhan eksternal. Adaptasi Jokowi melihat kondisi internal yang harus di sesuaikan dengan konteks internasional. Dari empat model adaptasi yang dalam teori Rosenau yakni hanya tiga yang menurut penulis tepat pada adaptasi Jokowi yakni: a) *preservative adaptation* (sikap responsif terhadap permintaan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal); b) *acquiescent adaptation* (bersikap peduli pada perubahan internal dan eksternal); c) *intransigent adaptation* (sikap responsif terhadap lingkungan internal).⁴ Dari ketiga model adaptasi di atas ada korelasi di mana Jokowi yang baru terpilih sebagai presiden harus menyadari dirinya bahwa dia adalah seorang nahkoda dalam kebijakan geopolitik maritim.

Jokowi serius melakukan adaptasi model Rosenau pada bagian ketiga model di atas, yaitu responsif terhadap lingkungan internal, artinya isu maritim yang merupakan isu domestik dijadikan sebagai isu internasional sebagai kebutuhan domestik sekaligus kebutuhan eksternal Indonesia. Kondisi ini terbukti pada dua KTT yang disebutkan di atas. Hal ini sudah tertuang dalam visi misi Jokowi pada halaman ke 12 yakni Jokowi ingin mengembalikan

⁴ Yanyan Mochamad Yani. Sistem Politik Luar Negeri. Disampaikan pada ceramah bagi Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Sesko TNI AU) Angkatan ke-45 TP 2008, Bandung, 14 Mei 2008.

Indonesia kepada identitas awalnya sebagai negara dengan metode pelaksanaan diplomasi dan kerja sama internasional. Upaya Jokowi ini di bentuk dalam lima agenda yakni : a) diplomasi maritim terkait masalah batas negara, b) menjamin integritas wilayah dan masa depan kesejahteraan pulau-pula terluar, c) mengamankan SDA dan ZEE, d) mengintensifkan diplomasi pertahanan serta e) meredam rivalitas anta negara terutama sengketa territorial.⁵

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa kebijakan geopolitik poros maritim Jokowi dilatarbelakangi oleh pandangan ideologi yang berangkat dari filosofi Pancasila serta Trisaksi Soekarno. Artinya kebijakan tersebut sudah diramu dengan baik oleh para elit partai politik beserta tim sukses Jokowi sehingga Jokowi hanya sebagai pelaksana semata. Selain itu juga, bahwa kebijakan ini membawa Indonesia pada konteks percaturan geopolitik dunia pada politik spasial maritim. Akibatnya kebijakan ini sangat militeristik dan unilateral yang juga dipengaruhi oleh tim suksesnya yang sebagian besar adalah TNI. Walaupun geopolitik maritim lahir dari seorang Alfred Mahan seorang AL namun kondifikasi atau kontekstual Indonesia sebagai negara pulau menjadikan teori geopolitik Mahan bisa di adopsi oleh Indonesia sebagai paradigma identitas nasional dalam kebijakan politik luar negerinya. Walaupun Jokowi menyadari betul akan kondisi geopolitik Indonesia yang strategis sebagai potensi nasional akan tetapi disisi lainya adalah kondisi tersebut cenderung menjadi titik rawan terhadap ancaman -

⁵ Fathun, L. M. (2018). Kebijakan Geopolitik Poros Maritim Di Era Jokowi Dalam filosofi Frame Ideologis. *Jurnal Power in International Relations (PIR)*, 1(2), 135-152.

ancaman terhadap kedaulatan dan produktifitas negara sebab Indonesia tersusun atas pulau-pulau.

Pendekatan geopolitik terhadap masalah sengketa Laut China Selatan sebenarnya sudah dapat terjawab oleh 5 elemen dasar dari poros maritim dunia. Saat ini Indonesia telah memulai paradigma pembangunan maritim ditingkatkan, bukan hanya paradigma pembangunan darat. Upaya dilakukan dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan laut melalui pengembangan industri perikanan yang diwujudkan dengan pemberantasan ilegal fishing oleh kementerian kelautan dan perikanan (KKP), pemberdayaan nelayan, konservasi kawasan laut. Indonesia juga mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Indonesia juga telah melakukan diplomasi maritim yang bertujuan menghilangkan berbagai sumber konflik di laut. Hal ini telah dilakukan terkait dengan penyelesaian konflik Laut China Selatan Blok-Natuna melalui forum-forum International. Indonesia juga mulai membangun kekuatan dan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta menjaga keselamatan, pelayaran, dan keamanan maritim. Hal ini dilakukan dengan memperkuat aparat keamanan dan pertahanan laut, baik melalui jalur militer atau polisi laut atau pengamanan sipil melalui kementerian kelautan dan perikanan yang mengawasi keamanan wilayah dari pencurian ikan. Kekuatan militer digunakan untuk menjaga kedaulatan negara dan sebagai antisipasi hal-hal yang tidak dapat ditolelir.

4.2. Kebijakan Pertahanan dan Keamanan

Pendekatan pertahanan dan keamanan dalam politik luar negeri Indonesia atas konflik Laut China Selatan Blok-Natuna bukan merupakan opsi yang utama, namun sebagai negara poros maritim dunia, harus mampu menunjukkan kekuatan militernya dalam menjaga kedaulatan wilayah. Secara juridis formal, Indonesia sudah sangat kuat atas kepemilikan wilayah lautnya, namun mempunyai konsekuensi yang tidak ringan, yaitu Indonesia harus mampu menjaga laut dan kekayaannya dari negara lain. Jika tidak mampu menjaganya, maka negara asing semakin leluasa untuk mencuri dan mengambil alih kekayaan laut di wilayah Indonesia. Dengan kemenangan Filipina dalam forum arbitase di Den Haag atas tuntutan terhadap klaim China, maka negara-negara yang berkonflik dengan China mempunyai kekuatan formal Yuridis yaitu UNCLOS 1982.⁶

Bicara kekuatan pertahanan dan keamanan dalam hal militer, Indonesia dan semua negara ASEAN lainnya masih sangat kalah jika dibandingkan dengan China. China telah memiliki satu kapal induk, yakni Liaoning, dan berniat membangun satu kapal induk lain, Warjag. Selain itu mempunyai 57 kapal selam, 78 kapal fregat dan kapal perusak, 27 korvet, 180 kapal patroli, 52 kapal pendarat dan 523 kapal penjaga pantai. Secara umum Angkatan Laut China memiliki 235.000 pasukan yang terbagi dalam tiga armada. Singapura hanya memiliki 3.000 pasukan, menguasai 4 kapal selam, 6 kapal fregat dan kapal perusak, 6 kapal korvet, 29 kapal patroli dan 102 kapal penjaga pantai. Thailand memiliki 44.000 tentara,

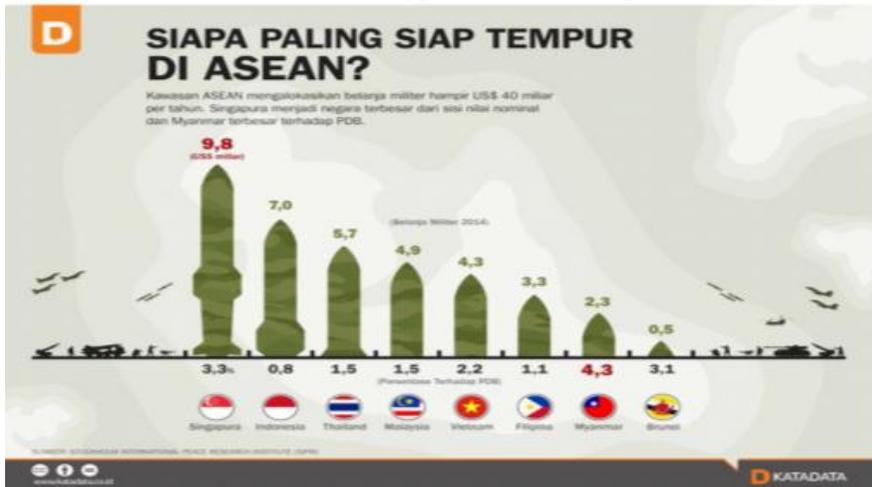
⁶ Trihastuti, N., Susetyorini, P. and Hanifah, M., 2017. Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Permanent Court of Arbitration. *Diponegoro Law Review*, 6(1), pp.1-9.

memiliki satu kapal induk dan helikopter buatan Spanyol, HTMS Chakri Naruebet, 9 kapal fregat dan perusak, 7 kapal korvet, 77 kapal patroli, 2 kapal pendarat dan 94 kapal penjaga pantai. Filipina memiliki 24.000 personil, 4 kapal fregat buatan Amerika Serikat, 10 unit korvet, 66 kapal patroli, 4 kapal pendarat dan 72 kapal penjaga pantai. Vietnam memiliki 40.000 serdadu, 7 kapal selam anyar kelas Kilo buatan Rusia, 2 kapal fregat, 7 kapal korvet, 61 kapal patroli, 8 kapal pendarat tank dan 78 kapal penjaga pantai. Indonesia saat ini Indonesia adalah kekuatan terbesar kedua setelah China dalam konflik di Laut China Selatan. TNI AL saat ini memiliki 2 kapal selam, 12 kapal fregat dan perusak, 27 korvet, 64 kapal patroli, 19 kapal pendarat tank dan 43 kapal penjaga pantai. Namun begitu usia armada laut Indonesia juga tergolong yang paling tua di kawasan. Malaysia berkekuatan 14.000 personil, 2 kapal selam anyar buatan Spanyol, Malaysia juga memiliki 10 kapal fregat atau perusak, 4 kapal korvet buatan Jerman, 33 kapal patroli dan 317 kapal penjaga pantai.⁷ Secara lengkap kekuatan militer negara-negara dapat dilihat di halaman selanjutnya dalam gambar berikut:

⁷ <https://www.dw.com/overlay/media/id/kekuatan-laut-negara-yang-bertikai-di-laut-China-selatan/39822238/40443970>, diakses tanggal 20 November 2018.

Indonesia. Meskipun sudah ada penambahan, namun proporsinya masih kecil dari PDB, kalah dengan negara-negara ASEAN Lainnya.

Gambar 4.3. Anggaran Militer negara ASEAN



Sumber: <https://katadata.co.id/>

Berdasarkan gambar di atas negara yang paling besar anggaran militernya adalah Singapura yaitu mencapai 9,8 milyar dolar, sedangkan Indonesia hanya 7 Milyar dollar. Untuk presentase dari PDB yang paling besar adalah Myanmar yaitu mencapai 4,3 % sedangkan Indonesia hanya 0,8 % atau terkecil di ASEAN. Dengan perbandingan tersebut, maka Indonesia dengan luas wilayah yang paling luas, seharusnya mempunyai anggaran militer yang paling besar.

Anggaran pertahanan keamanan dapat dilihat melalui anggaran Kementerian Pertahanan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2014 sampai 2019 (pagu Indikatif), kementerian pertahanan mendapat bagian anggaran tertinggi pada tahun 2016 yaitu 108,7 Triliun, meskipun tahun-tahun berikutnya menurun, seperti pada tahun 2017 menjadi 108 triliun, tahun 2018 menjadi 107,4 triliun dan

tahun 2019 menjadi 106 Triliun. Data tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 4.1. Grafik Anggaran Kementerian Pertahanan



Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber.

Tujuan pendekatan pertahanan dan kemandirian adalah tercapainya *sea power*, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Mahan, seorang laksamana terkemuka Angkatan Laut Amerika Serikat (AS). Mahan mendeskripsikan *sea power* sebagai kemampuan negara untuk melindungi kepentingan politik, ekonomi, dan militernya dengan menggunakan laut. Empat prinsip yang terkandung di dalam *sea power* yaitu *naval power*, *ocean science*, *ocean industry*, and *ocean commerce*. Menurut Corbett, *sea power* bukan hanya membahas tentang apa yang bisa negara lakukan di laut, tetapi juga mencakup efektivitas tindakan suatu negara di laut dan dapat memberikan dampak baik bagi aspek daratan.⁸

⁸ Till, Geoffrey. (2004). *Seapower: A Guide for Twenty-First Century*. New York: Routledge. Hal. 98.

Konflik Laut China Selatan mengharuskan Indonesia mempunyai kesiapan terhadap segala kemungkinan terjadi, termasuk kemungkinan terburuk harus terlibat atau bertahan dari ancaman Militer. Kajian Ryan Muhammad menjelaskan bahwa skala ancaman yang dihadapi oleh Indonesia terkait isu klaim China atas perairan dan Kepulauan Natuna menunjukkan hasil nilai akhir yang berada pada nilai koefisien skala “sedang”. Artinya kemungkinan terjadinya gangguan pertahanan keamanan pada level yang mungkin terjadi. Namun karena Indonesia yang pada masa pemerintahan Jokowi menggunakan strategi pertahanan berbasis defensif aktif, mengutamakan upaya kerja sama terkait sengketa wilayah di pulau-pulau kecil terluar tanpa tindakan agresif. Sehingga dalam kebijakan pertahanan dikenal dengan motto *defense support prosperity*. Pertahanan ditempatkan di pulau-pulau kecil terluar bukan saja untuk menjaga kedaulatan negara melalui operasi militer, tetapi juga membantu menjaga keamanan terlaksananya kegiatan pemanfaatan sumber daya penunjang perekonomian.⁹

Kebijakan pertahanan keamanan dalam merespons konflik Laut China Selatan diwujudkan dengan peningkatan anggaran untuk peremajaan dan penambahan alutsista, terutama untuk pembelian kapal dan pesawat serta persenjataan untuk menjangkau wilayah perbatasan Natuna. Penambahan armada kapal dan pesawat di daerah perbatasan digunakan untuk melindungi kedaulatan NKRI dari berbagai kemungkinan kontak yang akan terjadi. Meskipun secara geopolitik pertahanan keamanan hanya bersifat *defense support*

⁹ Asana, R., Suwartiningsih, S. and Nugroho, A.B.H., 2017. Kebijakan Pertahanan Indonesia Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Pada Masa Pemerintahan Jokowi. *Cakrawala*, 6(1), pp.35-58.

prosperity, namun dengan mempelajari segala permasalahan di Laut China Selatan, maka diperlukan pertahanan keamanan yang baik.

4.3. Kebijakan Hukum dan Diplomasi

Pendekatan hukum dan diplomasi dalam konflik Laut China Selatan telah dilakukan Indonesia sejak lama, sejak presiden pertama sampai presiden ketujuh, Presiden Joko Widodo dan sampai saat ini Indonesia aktif melakukan diplomasi untuk mewujudkan kawasan teritorial yang kondusif dan damai. Penyelesaian konflik yang terjadi harus menggunakan metode penyelesaian secara damai, yaitu diplomasi yang *win-win solution*. Diplomasi *soft power asimetris* perlu diterapkan baik negara maupun organisasi sehingga mampu menjadi alternatif penyelesaian konflik dengan catatan *win-win solution* dapat dirasakan secara langsung bagi mereka yang bersengketa. Penyelesaian dengan jalan damai telah lama diupayakan dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan, namun belum mendapatkan hasil yang memuaskan banyak pihak. Seperti yang dilakukan pada *first track diplomacy*, melalui pendekatan regional oleh ASEAN telah disepakati Deklarasi Tata Perilaku Pihak-Pihak di Laut China Selatan (*Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*) yang dirasa cukup berhasil dalam mengelola konflik, meskipun deklarasi ini belum mampu menyelesaikan sengketa secara permanen.

Indonesia sudah lama dikenal sebagai aktor kunci dalam perundingan dan lahirnya berbagai norma ASEAN Way dan pembangunan ASEAN seperti pembentukan ASEAN *Political Security Community* dan *Bali democracy Forum*. Indonesia juga merupakan juru damai atau mediator terpercaya dalam berbagai

konflik regional yang terjadi, seperti konflik Thailand –Kamboja dan konflik Filipina dan Myanmar.¹⁰ Sebagai aktor kunci penjaga perdamaian di wilayah ASEAN, Indonesia melalui berbagai rezim pemerintahan dikenal mempunyai peran menonjol untuk mengupayakan keamanan regional di Laut China Selatan.

Pada masa Orde Baru, sosok Presiden Soeharto menunjukkan kemampuannya dalam menjaga harmoni perdamaian di kawasan ASEAN termasuk di wilayah Laut China Selatan. Politik bebas aktif dan tidak mencampuri urusan negara lain diterapkan Presiden Soeharto. Namun demikian bukan berarti diam saja ketika ada persoalan regional, sehingga Indonesia waktu itu ikut mengupayakan perdamaian di kawasan Laut China Selatan dengan memfasilitasi *workshop* tahunan sejak tahun 1990-an untuk mencari jalan keluar sengketa di Laut China Selatan.¹¹ Di halaman selanjutnya adalah foto presiden Soeharto dalam salah satu pertemuan di ASEAN:

¹⁰ BPPK KEMENLU, (2015). Laporan Akhir Riset, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM 2015, hal 6.

¹¹ Hasyim Djalal, (2002). *Preventif Diplomacy in Southeast Asia: Lesson learned*, Jakarta: The Habibie Center, hal 45.

Gambar 4.4. Presiden Soeharto dalam Pertemuan ASEAN



Sumber: <http://soeharto.co/1976-02-24-presiden-soeharto-asean-summit-meeting/>

Pada masa Presiden Habibie, peran Indonesia tidak terlalu menonjol setelah lengsernya Soeharto, karena pada saat itu Habibie lebih banyak mengurus urusan internal Indonesia yang berada pada masa transisi reformasi. *ASEAN Regional Forum (ARF)* yang selalu di pakai Soeharto dinilai kurang efektif dalam menyelesaikan persoalan yang berkembang di kawasan sekitarnya. Konflik Filipina - China adalah salah satu persoalan yang memperkuat asumsi tentang kelemahan ARF dalam menemukan jalan keluar atas konflik yang berkembang di kawasan Laut China Selatan.¹²

Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), terdapat langkah penting politik luar negeri yang terkait dengan China. Pembentukan poros Jakarta-Beijing-New Delhi merupakan wujud pembangunan hubungan diplomatik yang menganggap pentingnya China dalam diplomasi di kawasan Asia Pasifik. Pemerintahan Gus Dur tidak terlalu aktif dalam penyelesaian konflik di Laut China

¹² Ibid., Hal.46

Selatan, tetapi melalui organisasi ASEAN melakukan penguatan organisasi dengan menginisiasi beberapa pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN serta melakukan pendekatan ke banyak negara melalui kunjungan luar negeri dengan mempromosikan kerja sama bilateral maupun multilateral.¹³

Presiden Megawati membuat langkah penting dalam konflik Laut China Selatan, yaitu membangun kerja sama bilateral Indonesia dan China yang diwujudkan dengan MoU pembentukan forum energi antara kedua negara pada tahun 2002 yang kemudian menjadi pintu masuk investasi China di bidang energi. Pada masa ini juga Indonesia berhasil menciptakan *Declaration on The Conduct of The Parties in the South China Sea* pada tahun 2002 di Kamboja, yaitu sebuah kompromi untuk mempromosikan rasa saling percaya diantara para pihak yang saling bersengketa, melibatkan dalam kerja sama maritim, dan mengupayakan COC.¹⁴ Salah satu kunjungan kenegaraan Presiden Megawati terhadap china dilakukan pada masa pemerintahanya yaitu 26 Maret 2002. Lawatan Presiden Megawati Sukarnoputri ke China syarat nuansa ekonomi daripada nuansa politik, dan didukung suasana romantisme masa silam turut mewarnai pertemuan putri sulung mantan Presiden Soekarno itu dengan Presiden Cina Jiang Zemin. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa MoU kerjasama bidang ekonomi. Di halaman selanjutnya adalah foto kunjungan Megawati ke China pada waktu itu:

¹³ Hartati, A. Y. (2016). Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan (Era Presiden Soeharto Sampai Presiden Jokowi). *Sosio Dialektika*, 1(2). 1-23. Hal. 16

¹⁴ Ibid. Hal 17.

Gambar 4.5. Kunjungan Presiden Megawati ke China



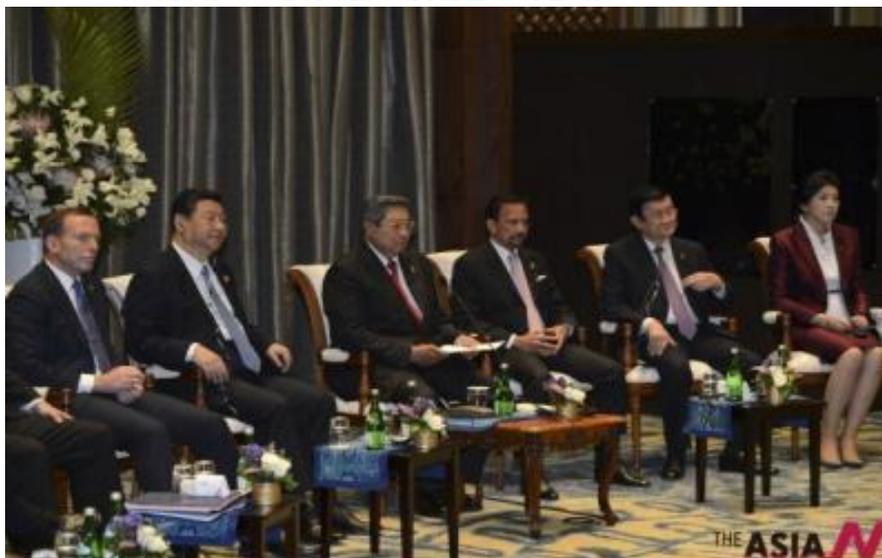
Sumber: <https://www.liputan6.com/news/diplomasi-dansa-ri-cina-bernuansa-romantisme>

Pemerintahan SBY pada Desember 2004, terlibat dalam pertemuan SOM (*Senior Official's Meeting*) yang membahas tentang DOC dan memutuskan membentuk grup kerja sama untuk membahas pelaksanaan DOC, diantaranya tentang konflik Laut China Selatan. Pada tahun 2011 – 2012 ada upaya penyusunan COC oleh ASEAN namun tidak dihadiri China. Pada pemerintahan SBY juga memunculkan “Doktrin Natalegawa” (*Dynamic Equilibrium*) atau keseimbangan. Perspektif *dynamic equilibrium* arti merujuk pada dinamisasi politik global dan menjaga keseimbangan antar negara dengan prinsip *win-win*. Indonesia berperan sebagai penengah konflik Laut China Selatan. Wujud nyatanya telah melaksanakan *South China Sea Informal Meetings* yang diadakan hampir setiap tahun dan melaksanakan sejumlah perundingan damai lainnya, seperti *Technical Working Groups (TWGs)*, *Groups of Experts (GEs)* dan *Study Groups (SGs)*.¹⁵ Selain itu pada pertemuan KTT APEC di Bali Tahun 2013, pertemuan antar kepala negara se-ASIAN sepakat

¹⁵ Ibid. Hal 17.

terhadap peningkatan kerjasama ekonomi dan keamanan regional. Berikut adalah salah satu foto pertemuan APEC tersebut:

Gambar 4.6. Pertemuan APEC di Bali



Sumber: <http://www.theasian.asia/archives/83823>

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo terus mendorong dan berpartisipasi aktif dalam mengupayakan terbentuknya *Declaration of Conduct* (DoC) dan kemudian *Code of Conduct* (CoC) untuk menekan tensi konflik di Laut China Selatan. Dengan mengeluarkan konsep poros maritim dunia, maka Indonesia mengedepankan perundingan dan kerja sama ekonomi dalam menyelesaikan setiap sengketa perbatasan, termasuk di Laut China Selatan. Pada tahun 2015, dalam pertemuan ke-15 *Joint Working Group (JWG) on DOC* dan pertemuan ke-10 *ASEAN-China Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (10th ASEAN-China SOM on DOC)* di Chengdu, Indonesia menyampaikan usulan untuk menyusun suatu *roadmap* atau *work plan* yang spesifik dalam

konteks konsultasi COC dan forum menyetujuinya. Pertemuan menyambut baik usulan ini dan menyepakati dua hal, yakni menambah waktu penyelenggaraan *JWG on DOC* menjadi 2 hari dengan menambah sesi drafting, serta menambah frekuensi pertemuan *JWG on DOC* dan *SOM on DOC* pada tahun 2016. Atas pendekatan Indonesia, pertemuan berhasil menyusun struktur dan elemen dari COC, yang tidak didasarkan pada draft salah satu pihak.¹⁶ Berikut salah satu foto upaya Presiden Jokowi melakukan dialog melalui ASEAN dengan China pada tahun 2016:

Gambar 4.7. Pertemuan antara ASEAN dengan China



Sumber: <https://asean.org/>

Pasca dikeluarkannya keputusan *Permanent Court of Arbitration (PCA)* terkait sengketa LCS pada tanggal 12 Juli 2016, Menlu RI telah menyampaikan surat kepada Menlu ASEAN yang pada intinya mengusulkan adanya *ASEAN Statement* yang menekankan komitmen untuk menjunjung tinggi tanggung jawab

¹⁶ Wawancara dengan Irjen Kemenlu, Rachmad Budiman, Tanggal 26 Agustus 2018.

ASEAN dalam menjadi perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Walaupun Negara Anggota ASEAN pada umumnya dapat mendukung proposal tersebut, Filipina dan Vietnam menginginkan adanya rujukan terhadap isu Laut China Selatan dan kaitannya dengan putusan PCA di dalam pernyataan bersama dimaksud, sementara Kamboja menentang adanya rujukan tersebut. Oleh karena itu, Indonesia telah melakukan pendekatan secara intensif dengan beberapa pihak yang memiliki kepentingan untuk mencari penyelesaian dan jalan tengah yang dapat diterima semua pihak. Konsultasi dan pendekatan intensif yang dilakukan oleh Menlu RI pada akhirnya berhasil mendorong para Menlu ASEAN untuk menyepakati *Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security, and Stability in the Region*, yang memuat elemen-elemen penekanan komitmen untuk: memastikan kawasan tetap damai, stabil dan aman; memajukan hubungan yang saling menguntungkan; terus menjunjung tinggi norma-norma dasar yang mengatur hubungan dan kerja sama antar negara; menekankan posisi bersama ASEAN dalam *Joint Communique of the 49th AMM*; menahan diri dan menghindari kegiatan yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan; meningkatkan persatuan, solidaritas, dan sentralitas ASEAN, serta mengajak negara lain untuk menghormati norma-norma dan prinsip-prinsip ASEAN.¹⁷

Klaim Laut China Selatan di Blok-Natuna pasca dikeluarkannya *Permanent Court of Arbitration (PCA)* terkait sengketa LCS sebenarnya secara legal formal tidak mempunyai

¹⁷ Wawancara dengan Irjen Kemenlu, Rachmad Budiman, Tanggal 26 Agustus 2018.

dasar, tidak ada konvensi yang mengatur tentang bagaimana suatu negara dan sejauhmana suatu negara dapat mengklaim suatu wilayah. Dalam konvensi hukum laut internasional sudah memberikan zonasi-zonasi tertentu untuk menentukan laut teritorial suatu negara. Untuk teritorial itu sejauh 12 petikemal, zona tambahan sampai sejauh 24 petikemal, zona ekonomi eksklusif sampai sejauh 200 petikemal. Untuk landas kontinen dasar laut dibawah, di atas 200 petikemal dapat mengklaim apabila ada *natural polindation* yaitu kepanjangan alami dari daratannya sampai dengan 350 petikemal kedalaman 2500 meter. Jadi dalam kasus laut Natuna utara jaraknya dengan China kurang lebih 1200 petikemal dan ditengahnya ada Vietnam dan Malaysia, sehingga secara jarak tidak mungkin mengklaim sampai Laut Natuna.¹⁸

Kebijakan hukum dan diplomasi Indonesia pada jaman Presiden Joko Widodo terkait konflik Laut China Selatan adalah melakukan pendekatan regional melalui organisasi ASEAN dan melakukan pendekatan kepada China, baik melalui ASEAN maupun secara diplomatik dan kerja sama di berbagai bidang. Melalui dua jalur tersebut, Indonesia berkeinginan ikut menjaga keamanan dan perdamaian di Laut China Selatan secara umum. Pada level organisasi ASEAN, Indonesia selalu mempromosikan perdamaian di Laut China Selatan kepada anggota ASEAN dan kepada China, begitu juga pada level kerja sama diplomatiknya. Inti dari kebijakan hukum dan diplomasi Indonesia dalam mensikapi konflik di Laut China Selatan adalah secara hukum tetap memegang prinsip-prinsip UNCLOS 1982, sedangkan secara diplomasi membangun diplomasi

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Hudiansyah, Kasi Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional, Bakamla RI. Tanggal 6 Juli 2018.

pada level organisasi dan pada level negara. Diplomasi yang diupayakan adalah menjaga stabilitas keamanan regional bersama antara negara ASEAN dengan China dan saling menjaga diri agar tidak terjadi ketegangan militer.

Perbedaan antara rezim Jokowi dengan rezim sebelumnya dalam mensikapi konflik dan perdamaian di Laut China Selatan adalah pada pendekatan ekonomi yang ditonjolkan. Presiden Jokowi mempererat kerja sama China dengan banyak melakukan kerjasama bilateral dan multilateral dibidang ekonomi, juga dibidang budaya, pendidikan dan pariwisata. Kerja sama ekonomi ditonjolkan dari pada kerja sama lainnya. Selain itu Jokowi juga tetap mendorong terciptanya kerja sama ekonomi antara China dengan ASEAN atau China dengan negara-negara anggota ASEAN. Nuansa kerja sama ekonomi lebih terasa pada pemerintahan Jokowi.

Perbedaan mendasar pada rezim Jokowi dengan Soesilo Bambang Yudoyono (SBY) dalam pendekatan hukum dan diplomasi intensitasnya lebih banyak pada era Jokowi baik dalam konteks hubungan bilateral maupun hubungan Multilateral melalui ASEAN. Kunjungan kenegaraan ke China dilakukan Jokowi selama 3 kali ditambah kunjungan balasan dari Presiden China, sedangkan pada pemerintahan SBY hanya sekitar dua kali dalam 10 tahun kekuasaannya. Intensitas kunjungan Jokowi ditindak lanjuti dengan para menteri dan staff kementerian yang ditugaskan menindaklanjuti MoU yang disepakati. Diksi kebijakan Jokowi dengan SBY hampir sama, yaitu kerja sama dalam bidang ekonomi dan perdamaian kawasan, terutama Laut China Selatan. Namun kerja sama dalam masa presiden Jokowi lebih intensif dan merambat pada banyak

bidang, seperti budaya, pariwisata, pendidikan dan lain sebagainya. Kebijakan Jokowi pada diplomasi terlihat berjalan efektif, di mana Jokowi berhasil meningkatkan nilai kerjasama, bidang kerja sama, dan kedalaman kerja sama. Dalam konteks kerja sama dan pertemuan ASEAN dengan China semakin meningkat, di mana Indonesia juga berhasil negara-negara ASEAN lain melakukan kerja sama dengan China, padahal sebelumnya berseteru terkait perbatasan.

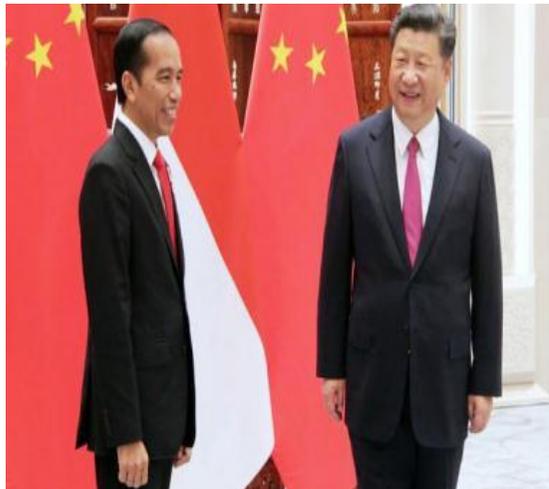
4.4. Kebijakan Kerja sama Ekonomi

Pendekatan kerja sama ekonomi yang dimaksud dalam konteks penyelesaian konflik Laut China Selatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kerja sama ekonomi untuk mengurangi ketegangan terhadap konflik yang terjadi. Pendekatan ekonomi dilakukan sebagai paradigma baru untuk menciptakan kerja sama saling menguntungkan dan saling membutuhkan sehingga mengurangi konflik yang terjadi. Masing-masing pihak dapat saling menahan diri terhadap suatu konflik karena merasa saling membutuhkan dan saling memberi keuntungan di bidang ekonomi.

Hal ini telah dilakukan pemerintahan Jokowi dengan mengadakan kunjungan kenegaraan kepada China pada tanggal 2 September 2016 di Hangzao (China), tidak lama setelah ada klaim sepihak dari China atas Blok-Natuna. Pertemuan tersebut terjadi antara Presiden Jokowi dengan Presiden China Xi Jinping untuk membicarakan kerja sama ekonomi dan hasilnya terdapat tiga kesepakatan. Pertama adalah upaya meningkatkan perdagangan dengan mempersempit gap defisit perdagangan Indonesia dengan China. Kedua adalah mengenai investasi, di mana perlunya peningkatan investasi kedua negara, terutama di bidang manufaktur

dan infrastruktur. Ketiga, mengenai pariwisata, di mana masyarakat China akan didorong untuk berkunjung ke Indonesia.¹⁹ Indonesia bukan hanya mendorong dan meningkatkan kerja sama dengan China, tetapi lebih dari itu mendorong kerja sama ASEAN dengan China terutama dalam kerja sama ekonomi, baik itu melalui perdagangan dan industri, pertambangan dan mineral, kelautan dan perikanan serta pariwisata. Berikut Dokumentasi pertemuan Presiden Jokowi dengan Xi Jinping:

Gambar 4.8. Pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden China



Sumber: <http://setneg.go.id>

Sebelumnya, pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke China dengan agenda mengumumkan pernyataan kerja sama antara kedua negara. Terdapat delapan MoU yang ditandatangani, yaitu: 1) MoU bidang ekonomi; 2) MoU Proyek Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung; 3) MoU maritim dan SAR; 4) MoU pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara; 5) MoU kerja sama Antariksa 2015-2020; 6) MoU saling dukung

¹⁹ Asmara, Tia. 02-09-2016. Indonesia dan China Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi. https://www.benarnews.org/indonesian_/berita/indonesia-China-09022016143532.html, diakses tanggal 21 Desember 2017.

antara Kementerian BUMN dan Bank Pembangunan China Pembangunan; 7) MoU pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara; dan 8) Mou kerja sama bidang industri dan infrastruktur.²⁰ Sebagian besar MoU di atas adalah dalam bidang ekonomi atau paling tidak yang mendukung dalam bidang ekonomi. Kedua negara sepakat mempererat hubungan bilateral dalam bidang ekonomi.

Pada tanggal 14 Mei 2017, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing untuk membahas peningkatan kerja sama ekonomi bilateral Indonesia dan China. Pemerintah China telah setuju untuk membuka akses pasar bagi produk-produk pertanian dan peternakan Indonesia, khususnya sarang burung walet, buah naga, durian, dan produk susu. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Presiden Jinping dilaksanakan di sela-sela pertemuan “*Belt and Road Forum for International Cooperation*” (BRF). Pertemuan BRF yang diselenggarakan oleh Pemerintah China bertujuan untuk membahas rencana konsep “*One Belt One Road*” (OBOR), yakni suatu strategi pembangunan yang diusulkan Presiden Xi Jinping yang berfokus pada konektivitas dan kerja sama antarnegara, terutama antara China dan seluruh negara Eurasia, yang terdiri dari dua komponen utama jalur ekonomi – jalur sutra darat dan jalur sutra maritim.²¹ Berikut di halaman selanjutnya salah satu foto kegiatannya:

²⁰ <https://kumparan.com/laurensia-t/hubungan-bilateral-yang-terjalin-antara-indonesia-dengan-china>, diakses tanggal 18 November.

²¹ Diego. 2017. Presiden Jokowi dan Xi Jinping akan Bertemu di Beijing. http://www.zejournal.mobi/id/index.php/news/show_detail/10652, diakses tanggal 20 November 2018.

Gambar 4.9. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Xi Jinping



Sumber: https://www.zejournal.mobi/id/index.php/news/show_detail/10652

Pada tahun 2017 yang lalu Indonesia menjadi tuan rumah lokakarya pengelolaan potensi konflik China Selatan pada tanggal 16-17 November 2017 di Jakarta. Workshop diikuti oleh 70 peserta yang berasal dari Brunei Darussalam, RRT, Filipina, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Vietnam dan China Taipei. Lokakarya ini dapat mendorong tercapainya *code of conduct* atau etika berperilaku di Laut China Selatan. Lokakarya tersebut menghasilkan 8 proyek kerja sama antar negara di kawasan Laut China Selatan. Hal ini menjadi langkah awal untuk menciptakan iklim yang kondusif dan menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan kerja sama ekonomi.²² Pada tahun 2018,

²² Ghozali, P. 16 November 2017. Indonesia dorong kerja sama selesaikan konflik Laut China Selatan. <https://aa.com.tr/id/headline-hari/indonesia-dorong-kerja-sama-selesaikan-konflik-laut-china-selatan-/966695>, diakses tanggal 12 Desember 2017.

kunjungan Perdana Menteri China Li Keqiang ke Indonesia berhasil menandatangani sejumlah kesepakatan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan yaitu dalam bidang infrastruktur dan dalam bidang kemaritiman, termasuk di wilayah Laut China Selatan. Kerja sama dalam bidang infratsruktur diantaranya kerja sama pembangunan Waduk Jenelata serta membuka investasi di sektor infrastruktur meliputi pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik. Dalam bidang maritim paling tidak meliputi kerja sama dalam perikanan kelautan, energi, IUU Fishing, keamanan regional laut, serta pariwisata.²³

Berbagai arah kebijakan politik luar negeri Presiden Joko Widodo di atas diyakini telah membawa Indonesia kepada masa “*geopolitics*”. Di mana setiap negara akan berusaha untuk melakukan transformasi baik internal maupun eksternal berdasarkan kepentingan nasional untuk memperebutkan kekuasaan dan pengaruh dari berbagai negara lain. Pada hubungan politik dan geografi, Indonesia akan menekankan lautan sebagai kekuatan pada masa depan, baik terkait dengan pertahanan keamanan, ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang ada. Laut menjadi sentral untuk menentukan kebijakan nasional dan internasional. Dengan konsep poros maritim dunia, Indonesia menatap masa depan kejayaan maritim di masa yang akan datang. Hal ini karena konsep Poros Maritim Dunia mengandung unsur perubahan paradigma kemaritiman yang lebih baik, pertahanan keamanan, pengelolaan ekonomi dan sumber daya, dan diplomasi untuk kedamaian serta stabilitas wilayah.

²³ <http://finansial.bisnis.com/read/20180507/9/792479/poin-poin-kesepakatan-kerja-sama-ekonomi-China-indonesia>, diakses tanggal 20 November 2018.